CASCADING

VISI

Mewujudkan Gresik Baru yang Lebih Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah.

MISI

Mendorong Kemandirian Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah

TUJUAN

Menciptakan iklim investasi yang kondusif

Rasio Kontribusi Sektor Manufaktur

SASARAN

Meningkatnya angka investasi	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya investasi sektor unggulan manufaktur dan diversifikasi sektor strategis	Meningkatnya kemudahan layanan investasi
Pertumbuhan realisasi investasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Realisasi Investasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat untuk Layanan Perizinan dan Penanaman Modal
		Realisasi Investasi Sektor Manufaktur	
		Pertumbuhan Realisasi Investasi	
		Pertumbuhan Realisasi Investasi Sektor Manufaktur	
		Rasio PDRB Industri Pengolahan	
		Rasio Kemitraan Usaha Besar dengan UMKM	

PROGRAM

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif	Meningkatnya promosi penanaman modal secara terarah, informatif dan kolaboratif mendorong peningkatan minat dan realisasi investasi di daerah	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif	Meningkatnya iklim penanaman modal yang kondusif, transparan, kompetitif melalui pertumbuhan PDRB	Terkelolanya data dan informasi perizinan dan non perizinan	Meningkatnya penerbitan izin/sertifikasi/NIB/persetujuan/surat pernyataan
Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Pertumbuhan Promosi Penanaman Modal	Persentase Kepatuhan Perusahaan	Tingkat Kematangan Layanan Penanaman Modal	Persentase ketercapaian sasaran kegiatan	Persentase Penyelesaian Ijin perizinan dan non perizinan	Persentase kepatuhan perusahaan dalam pelaporan LKPM	Realisasi total terhadap target investasi	Rasio Investasi Manufaktur terhadap Total Investasi Masuk Daerah	Pertumbuhan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Tingkat layanan penanaman modal dan persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase penyelesaian ijin
						Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan membuka usaha							Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan

KEGIATAN

Kegiatan	Indikator 1	Indikator 2
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis promosi penanaman modal	Jumlah jenis promosi penanaman modal
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi	Jumlah jenis pengelolaan data dan informasi
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan barang milik daerah	
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan	
Terkendalinya pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, tertib, dan berkelanjutan di daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	
Terkendalinya pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sesuai dengan ketentuan dan mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat, tertib, dan berkelanjutan di daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantuan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	
Tersusunnya dokumen perencanaan penanaman modal	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	
Meningkatnya daya tarik investasi melalui pemberian fasilitas dan/atau insentif yang tepat sasaran, sesuai kewenangan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	
Terselenggaranya promosi investasi penanaman modal	Jumlah jenis promosi penanaman modal	
Meningkatnya daya tarik investasi melalui pemberian fasilitas dan/atau insentif yang tepat sasaran, sesuai kewenangan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitasi	
Meningkatnya daya tarik investasi melalui pemberian fasilitas dan/atau insentif yang tepat sasaran, sesuai kewenangan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.	Jumlah draft kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas	
Terselenggaranya pengelolaan data dan informasi perizinan	Jumlah jenis pengelolaan data dan informas	
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang cepat, transparan, akuntabel, dan terintegrasi	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan	
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal yang cepat, transparan, akuntabel, dan terintegrasi	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan	

SUB KEGIATAN

Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
Jumlah draf Rancangan Peraturan Tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik	Jumlah kajian tentang Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Gresik	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal
Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah draf Rancangan Peraturan Tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Jumlah Rancangan Peraturan Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kab. Gresik	Jumlah kajian tentang Peta Potensi dan Peluang Usaha di Kabupaten Gresik			Jumlah kajian mengenai strategi promosi penanaman modal
Jumlah peraturan daerah/provinsi dalam pemberian fasilitas/ insentif dan kemudahan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Pengawasan Penanaman Modal	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah promosi investasi	Jumlah pelaksanaan pemantauan penanaman modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah pemanfaat sistem informasi
Jumlah dokumen hasil promosi penanaman modal kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dionalh, dikaji dan dimanfaatkan
Jumlah promosi investasi	Jumlah pelaksanaan pemantauan penanaman modal	Jumlah pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal				Jumlah pemanfaat sistem informasi
Jumlah dokumen hasil promosi penanaman modal kabupaten/kota	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan				Jumlah data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dionalh, dikaji dan dimanfaatkan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah jenis dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah gaji ASN DPM PTSP	Jumlah dokumen Laporan Keuangan SKPD	Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan gedung	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor	Jumlah jenis bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis bahan bacaan dan bahan peraturan perundang-undangan
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Mebel	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pengiriman surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	Jumlah jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jenis pemeliharaan mebel	Jumlah jenis pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung	Jumlah jenis pemeliharaan sarpras pendukung gedung
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Meningkatnya pelaku usaha yang memiliki pemahaman dan kapasitas melalui pelaksanaan bimbingan teknis	Terselesaikannya permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Terlaksananya pengawasan penanaman modal	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Jumlah izin/rekomendasi/persetujuan/sertifikasi/pendaftaran dan atau izin ternotifikasi	Jumlah izin / rekomendasi yang terbit	Jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku, dilakukan inspeksi lapangan ; serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang mendapatkan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan non perizinan penanaman modal	Jumlah orang yang memperoleh layanan konsultasi dan terkelolanya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang melakukan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/ insentif daerah								

Termutakhirnya data potensi investasi daerah pada Sistem PIR	Tersusunnya perencanaan penanaman modal di bidang manufaktur	Terlaksananya promosi penanaman modal daerah Kabupaten Gresik	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal	Tersusunnya rekomendasi kebijakan sektor usaha berbasis risiko yang terharmonisasi dengan ketentuan perizinan nasional guna mendukung iklim kemudahan berusaha dan kepastian hukum di daerah	Terciptanya kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Tersusunnya kebijakan daerah yang mendukung pemberian fasilitas, insentif, dan kemudahan penanaman modal secara adil, transparan	Pengolahan data dan informasi perizinan dan non perizinan	Terlaksananya penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Tersedianya pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan perizinan berusaha berbasis risiko secara terpadu untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perizinan
Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Jumlah RUPM dan peta potensi peluang usaha yang disusun	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kegiatan usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas daerah kabupaten/kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha